

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai)**

Oleh :

Raja Yoga Gustika Armel

Pembimbing : Azwir Nasir dan Devi Safitri

Faculty Of Economics, Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email : rajayoga17@yahoo.com

*The Effect Of Human Resources Competencies, Implementation accounting
standard, utilization of technology information and Internal
control system on the quality of financial statement.
(Study in the SKPD's Government Of Dumai)*

ABSTRACT

This study aimed to identify the competence of human resources, the impact of government accounting standards, the use of information technology and internal control systems on the quality of government financial reports Dumai. The study was conducted in Dumai SKPD government. Determination of sample criteria based on the premise that the Administrative Unit-Regional Financial Officer Job (KDP-SKPD), the department of finance and treasurer SKPD staff directly involved in the planning, implementation, administration, reporting, accountability and financial oversight of the area. the sample is determined by using purposive sampling and respondent amounted to 87 people. The data used are primary data. Data were collected through questionnaires. Data were analyzed using data analysis techniques to assess the outer SmartPLS models: Convergent Validity, Composite Discriminant Validity and Reliability. The results of this study indicate that the competence of human resources, government accounting standards, the use of information technology and internal control systems to significantly affect the quality of financial reporting. Quality variable Financial Statements (KLK) of 0.89. This shows that 89% of the variable quality of financial reports may be affected by the competence of human resources, utilization of information technology, the implementation of SAP and internal control systems. And the balance of 11% influenced by other factors.

Keywords: accounting, control, competencies, technology, and quality

PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai

posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah harus

menyajikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan yang disajikan oleh suatu entitas pelaporan harus memiliki empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Pemerintah daerah dituntut agar pengelolaan keuangan daerah secara baik yang harus dilakukan dalam mewujudkan tujuan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*), dimana pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah kemampuan mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan

disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu Relevan, Andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disampaikan kepada Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang mana sebagai auditor independen yang akan mengaudit laporan keuangan pemerintah guna untuk mengetahui tingkat kualitas informasi yang dimiliki oleh LKPD tersebut. Selain penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan SAP, kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, kualitas sistem pengendalian internal, bukti-bukti yang memadai dan penyajian laporan keuangan secara keseluruhan yang nantinya akan menjadi pertimbangan di dalam pemeriksaan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Salah satu contohnya adalah pada Pemerintah Kota Dumai dijelaskan dalam dijelaskan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan opini **Wajar Dengan Pengecualian** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2014.

BPK menemukan adanya **kelemahan sistem pengendalian intern** dalam

penyusunan laporan keuangan, yaitu: (1) Penatausahaan kas Pemerintah Kota Dumai kurang memadai; (2) Aset Lainnya – Aset Lain-lain tidak diyakini kewajarannya; (3) Kesalahan penganggaran pada empat SKPD; (4) Penatausahaan dan pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kota Dumai belum memadai; dan (5) Penyertaan modal Pemerintah Kota Dumai pada PDAM Tirta Dumai Bersemai dan PT Pembangunan Dumai tidak sesuai ketentuan.

BPK juga menemukan adanya **ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan** dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu: (1) Pelaksanaan paket pekerjaan revitalisasi ruang kelas SDN Wilayah Labour Housing 10 kelas bertingkat tidak sesuai kontrak dan terdapat kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan; (2) Terdapat penggunaan atas penerimaan retribusi Terminal Barang; dan (3) Jaminan Pelaksanaan tidak melindungi periode Perjanjian Kerjasama dan dicairkan oleh Penyedia Barang/Jasa. (<http://pekanbaru.bpk.go.id>)

BPK menemukan adanya **kelemahan sistem pengendalian intern** dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu: (1) Penatausahaan kas Pemerintah Kota Dumai kurang memadai; (2) Aset Lainnya – Aset Lain-lain tidak diyakini kewajarannya; (3) Kesalahan penganggaran pada empat SKPD; (4) Penatausahaan dan pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kota Dumai belum memadai; dan (5) Penyertaan modal Pemerintah Kota Dumai pada PDAM Tirta Dumai Bersemai dan PT

Pembangunan Dumai tidak sesuai ketentuan.

BPK juga menemukan adanya **ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan** dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu: (1) Pelaksanaan paket pekerjaan revitalisasi ruang kelas SDN Wilayah Labour Housing 10 kelas bertingkat tidak sesuai kontrak dan terdapat kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan; (2) Terdapat penggunaan atas penerimaan retribusi Terminal Barang; dan (3) Jaminan Pelaksanaan tidak melindungi periode Perjanjian Kerjasama dan dicairkan oleh Penyedia Barang/Jasa. (<http://pekanbaru.bpk.go.id>)

Berdasarkan fenomena informasi tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan Kota Dumai masih belum memenuhi karakteristik kualitatif yang disyaratkan, sehingga pemerintah Kota Dumai perlu membenahi bagian penatausahaan keuangan agar menghasilkan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitas yang disyaratkan.

Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor terpenting dalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan. Seperti yang kita ketahui, proses penyusunan laporan keuangan merupakan proses terpenting dari suatu organisasi untuk mengetahui bagaimana kinerja atau existensi suatu organisasi dalam satu periode, maka dari itu jika tidak didukung dengan kompetensi yang

berlatar belakang pendidikan dibidang akuntansi maka penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal tidak dapat berjalan dengan efektif dan tidak bisa menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang dapat dipakai oleh pengguna informasi tersebut.

Standar Akuntansi Pemerintahan dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas Dan Catatan atas Laporan Keuangan. Peraturan Pemerintahan ini juga merupakan pelaksanaan Pasal 184 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen departemennya maupun di pemerintah daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di yakini berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. (Nordiawan, 2009:25)

Pemanfaatan teknologi juga merupakan salah satu factor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Kewajiban pemanfaatan teknologi oleh pemerintah diatur dalam PP nomor 56 tahun 2005 tentang system informasi keuangan

daerah. Manfaat dari penggunaan teknologi informasi ini yaitu mempercepat proses transaksi, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar dan kemampuan multiprocesing.

Selain itu, adanya pengendalian internal berfungsi untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dengan sistem pengendalian intern akuntansi yang baik, risiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan atau perhitungan dapat diminimalisasi sehingga mengurangi kemungkinan pemerintah daerah mengalami kekeliruan.

Penelitian ini merupakan penelitian gabungan dari penelitian yang dilakukan oleh Nurillah dan Muid (2014) dan Wati (2014).

Rumusan permasalahan yang diteliti, adalah: 1) Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Dumai? 2) Apakah penerapan standar akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Dumai? 3) Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Dumai? 4) Apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahdaerah Kota Dumai?

Adapun tujuan penelitian adalah: 1) Untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 2) Untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris pengaruh penerapan Standar akuntansi Pemerintah terhadap

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 3) Untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 4) Untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris pengaruh penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan (Wati, 2014). Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang disajikan oleh suatu entitas pelaporan harus memiliki empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Relevan adalah apabila informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan para pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Andal yaitu penyajian laporan keuangan disajikan dengan keadaan sebenarnya bebas dari kata menyesatkan, bersifat netral. Dapat dibandingkan antar periode ataupun antar entitas. Kemudian dapat dipahami yaitu dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas penggunaan pengguna.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010,

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Selain menyediakan informasi untuk para pengguna laporan keuangan, laporan keuangan juga merupakan alat atau media bagi sebuah entitas didalam pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang berkualitas.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia dalam organisasi atau lembaga pemerintahan mempunyai arti yang sama pentingnya dengan pekerjaan itu sendiri, mengingat pentingnya peran Sumber Daya Manusia dalam organisasi atau lembaga pemerintahan, SDM sebagai faktor penentu organisasi atau lembaga pemerintahan maka kompetensi menjadi aspek yang menentukan keberhasilan organisasi atau lembaga pemerintahan. Dengan Kompetensi yang tinggi yang dimiliki oleh SDM dalam suatu organisasi atau lembaga pemerintahan tentu hal ini akan menentukan kualitas SDM yang dimiliki yang pada akhirnya akan menentukan kualitas kompetitif lembaga pemerintahan itu sendiri.

Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi, atau suatu

sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Hariandja, 2002). SDM sebagai faktor penentu organisasi atau lembaga pemerintahan maka kompetensi menjadi aspek yang menentukan keberhasilan organisasi atau lembaga pemerintahan.

Penerapan Standar Akuntansi

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah standar yang mengatur bagaimana penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum demi meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.

Salah satu langkah nyata pemerintahan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan dibuatnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 32 ayat 1 mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah.

Pemanfaatan Teknologi

Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses mendapatkan menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan akurat dan tepat waktu,

yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global.

Dalam penjelasan peraturan pemerintah No.56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah disebutkan bahwa menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik.

Sistem Pengendalian Internal

Secara sederhana, pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan

prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku (Nurillah dan Muid. 2014).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah mendefinisikan bahwa, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pengaruh kompetensi sumber daya manusia Terhadap kualitas laporan keuangan

Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes). Sumber daya manusia diukur berdasarkan latar belakang pendidikan yang diperoleh pegawai

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian yang dilakukan oleh Nurillah dan Mulid (2014), dan Munteh (2013) yang mampu membuktikan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengambil variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia dikarenakan masih adanya ketidak konsistenan hasil dari penelitian terdahulu dan perbedaan lokasi geografis.

Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah

H₁: Diduga Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan konsep atau aturan akuntansi yang diterapkan oleh pemerintahan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintahan merupakan salah satu produk hukum yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang diterapkan baik di pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota di Indonesia.

Menurut Roviyantri (2011) kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh seberapa andal standar akuntansi yang diterapkan. Sehingga itu salah satu cara untuk

meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah. Bastian juga menjelaskan (138;2010) SAP merupakan prasyarat yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Indonesia.

Tujuan dari penerapan standar akuntansi ini adalah menjadi acuan bagi penyusun standar akuntansi pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya, penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar, pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, dan para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi.

Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah

H₂ : Diduga Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola informasi secara cepat dan akurat. Oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan, sehingga

laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatan waktu.

Hasil penelitian yang ditemukan oleh Nurillah dan Mulid (2014) bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan hasil penelitian Akbar (2014) dan Dyah (2015) pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Ketidak konsistenan hasil penelitian ini menyebabkan peran variabel pemanfaatan teknologi perlu diteliti kembali.

Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah

H₃: Diduga Pemanfaatan Teknologi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap kualitas laporan keuangan

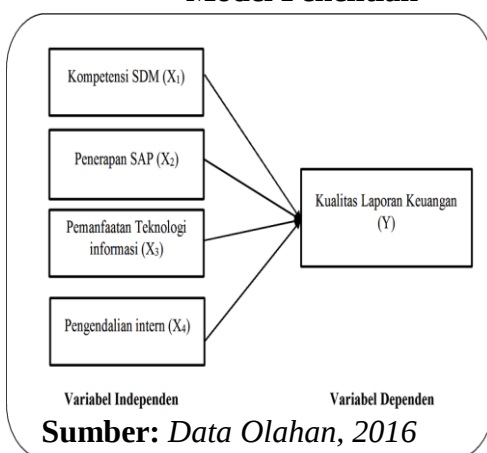
Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan. Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Pada tingkatan organisasi, tujuan pengendalian intern berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan operasional dan strategis, serta kepatuhan pada hukum dan regulasi.

Sukmaningrum (2012), membuktikan secara empiris bahwa pengendalian internal pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Dari uraian diatas penulis menggunakan kembali variabel Sistem Pengendalian Internal kedalam penelitian dikarenakan perbedaan lokasi geografis dari penelitian terdahuludan ketidak konsistenan hasil penelitian.

Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah

H₄: Diduga Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan keuangan.

Gambar 1
Model Penelitian



METODE PENELITIAN

Penetapan daerah penelitian ini dilakukan di Kota Dumai tepatnya di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai, dengan pertimbangan memudahkan peneliti dalam pengumpulan data. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini lebih kurang 2 bulan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) Kota Dumai.

Penentuan kriteria sampel didasarkan pada alasan bahwa Pejabat Penatausahaan Keuangan-Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), Staff bagian keuangan dan Bendahara SKPD merupakan pihak yang terkait langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Responden dalam penelitian ini berjumlah 99 (Sembilan puluh sembilan) orang dari 33 (tiga puluh tiga) SKPD yang masing-masing SKPD ada 3 (tiga) responden.

Variabel Penelitian dan Pengukurannya

Variabel dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan (Y) adalah Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependan adalah kualitas laporan keuangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, kualitas laporan keuangan tersebut dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan tersebut. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Karakteristik tersebut yang selanjutnya akan dijadikan sebagai indikator.

Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pertanyaan yang dikembangkan oleh Saputra

(2015), diukur dengan menggunakan skala likert (*Likert scale*) yang berkaitan dengan 9 (sembilan) item pertanyaan menggunakan 5 poin penilaian, yaitu: (1) Sangat tidak setuju, (2) Tidak setuju, (3) Tidak Tahu, (4) setuju, (5) Sangat setuju.

Variabel Independen

Penelitian menggunakan empat variabel independen yaitu :

- a. Kompetensi sumber daya manusia
Variabel kompetensi sumber daya manusia (X_1) Kompetensi adalah kecakapan yang memadai untuk melakukan suatu tugas atau sebagai memiliki ketrampilan & kecakapan yang diisyaratkan. Dengan kompetensi yang tinggi yang dimiliki oleh SDM akan menentukan kualitas kompetitif lembaga pemerintah itu sendiri. Dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 4 (empat) indikator yang , yaitu 1) Akuntabilitas; 2) Manajemen; 3) Transparansi dan 4) Keseimbangan Antar Generasi. Pertanyaan diukur dengan menggunakan 5 skala likert, dimana yang dimulai dari skala 1 “ sangat tidak setuju” sampai skala 5 yang menunjukkan “sangat setuju”.
- b. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.
Variabel penerapan standar akuntansi pemerintah (X_2) adalah Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan

pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 4 (empat) indikator yang , yaitu 1) Akuntabilitas; 2) Manajemen; 3) Transparansi dan 4) Keseimbangan Antar Generasi. Pertanyaan diukur dengan menggunakan 5 skala likert, dimana yang dimulai dari skala 1 “ sangat tidak setuju” sampai skala 5 yang menunjukkan “sangat setuju”.

- c. Pemanfaatan teknologi informasi
Variabel pemanfaatan teknologi (X_3) merupakan penggunaan secara optimal dari computer, perangkat lunak (software) dan jaringan (internet). Penelitian ini diukur dengan menggunakan 5 indikator dan 8 pernyataan yang menggunakan 5 skala likert, dimana dimulai dari skala 1 “sangat tidak setuju” sampai skala 5 yang menunjukkan “sangat setuju”.
- d. Variabel sistem pengendalian intern (X_4) adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah mendefinisikan bahwa, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan

keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 4 (empat) indikator yang , yaitu 1) Akuntabilitas; 2) Manajemen; 3) Transparansi dan 4) Keseimbangan Antar Generasi. Pertanyaan diukur dengan menggunakan 5 skala likert, dimana yang dimulai dari skala 1 “sangat tidak setuju” sampai skala 5 yang menunjukan “sangat setuju”.

Metode Analisis Data

Metode analisis data menggunakan pendekatan *partial least square* (PLS) dalam hal ini akan menggunakan *software* smartPLS 3.0. dalam latan dan ghozali (2012) djelaskan bahwa PLS merupakan pendekatan alternative yang bergeser dari pendektan SEM berbasis *Covariance* menjadi *variance*

Partial Least Square (PLS)

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS). PLS adalah model persamaan struktural (SEM) yang berbasiskomponen atau varian (*variance*). Dan Model Pengukuran atau *Outer Model* serta Model Struktural atau *Inner Model*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pengembalian Kuesioner

Dalam rangka keperluan penelitian, pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data primer menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung

kepada 33 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Dumai. Dengan mengambil masing-masing 3 responden pada setiap SKPD.

Jumlah kuesioner yang disebar sejumlah 99 kuesioner. Dari seluruh kuesioner yang disebar peneliti, jumlah kuesioner yang kembali berjumlah 87 (87,87%).

Hasil Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan gambaran tentang ringkasan data dari masing-masing variabel yang akan masuk dalam proses pengujian yang bertujuan untuk mempermudah memahami data. Statistik deskriptif ini menggambarkan tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan standar Akuntansi Pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem Pengendalian Intern, dan kualitas laporan keuangan. Statistik disajikan dalam tabel *descriptive statistics* yang menunjukkan angka minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi yang dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KLK	87	23,00	45,00	37,4598	4,59981
KSDM	87	20,00	40,00	32,9310	4,17855
PTI	87	20,00	40,00	32,5402	4,13382
SPI	87	43,00	80,00	66,6667	8,29355
SAP	87	21,00	35,00	29,2069	3,77919
Valid N (listwise)	87				

Sumber : Data Olahan, 2016

Nilai rata-rata kelima variabel tersebut lebih besar dari pada nilai standar deviasinya, sehingga ini menunjukkan bahwa penyebaran data sudah baik.

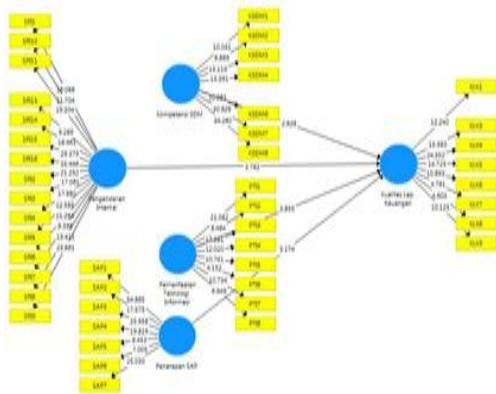
Pengujian Hipotesis

Dalam PLS pengujian secara statistik setiap hubungan yang

dihipotesiskan dilakukan dengan menggunakan simulasi. Dalam hal ini dilakukan metode *bootstrap* terhadap sampel.

Hasil pengujian dengan *bootstrapping* dari analisis PLS dapat dilihat pada tabel sebelumnya disajikan gambar hasil bootstrapping.

Gambar 2
Hasil Bootstrapping



Sumber : Data Olahan, 2016.
Tabel 2

Hasil Bootstrapping

	Original Sample	Sample Mean	Standard Deviation	t statistics	p value
KSDM -> KLK	0,388	0,364	0,147	2,628	0,010
SAP -> KLK	0,637	0,589	0,123	5,174	0,000
PTI -> KLK	0,489	0,468	0,127	3,855	0,000
SPI -> KLK	0,677	0,677	0,179	3,782	0,000

Sumber : Data Olahan, 2016.

Hasil Pengujian Hipotesis

Dalam PLS pengujian secara statistik setiap hubungan yang dihipotesiskan dilakukan dengan menggunakan simulasi. Dalam hal ini dilakukan metode *bootstrap* terhadap sampel. Pengujian dengan *bootstrap* juga dimaksudkan untuk meminimalkan masalah ketidakanormalan data penelitian.

Hasil pengujian *boots trapping* dari analisis PLS adalah sebagai berikut :

Pengujian hipotesis 1 (Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan)

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil pengujian hipotesis 1 ini dapat dilihat pada tabel 2 yang menunjukkan bahwa hubungan variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM) dengan Kualitas Laporan Keuangan (KLK) menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,388 dengan nilai t statistic sebesar 2,268. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel sebesar 1,96. Hasil ini berarti menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti **Hipotesis 1 diterima**.

Hal ini mengindikasikan bahwa SDM sangat berpengaruh terhadap kesiapan dan efektifitas di dalam implementasi sistem akuntansi keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai. SDM yang terlibat dalam implementasi sistem akuntansi keuangan daerah dituntut untuk memiliki kompetensi yaitu suatu keahlian dan pengetahuan yang baik untuk dapat menyelesaikan tugas.

Pengujian hipotesis 2 (Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan)

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah penerapan

standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil pengujian hipotesis 2 ini dapat dilihat pada tabel 2 yang menunjukkan bahwa hubungan variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan Kualitas Laporan Keuangan (KLK) menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,637 dengan nilai t statistik sebesar 5,174. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel sebesar 1,96. Hasil ini berarti menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti **Hipotesis 2 diterima**.

Dengan meningkatnya penerapan standar akuntansi pemerintahan Kota Dumai maka laporan keuangan yang dibuat akan semakin berkualitas. Sebaliknya apabila laporan standar akuntansi pemerintah tidak diterapkan maka laporan keuangan yang disajikan tidak berkualitas.

Pengujian hipotesis 3 (Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan)

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil pengujian hipotesis 3 ini dapat dilihat pada tabel 2 yang menunjukkan bahwa hubungan variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) dengan Kualitas Laporan Keuangan (KLK) menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,489 dengan nilai t statistik sebesar 3,855. Nilai tersebut lebih

besar dari t tabel sebesar 1,96. Hasil ini berarti menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti **Hipotesis 3 diterima**.

Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan

Pengujian hipotesis 4 (Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan)

Hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil pengujian hipotesis 4 ini dapat dilihat pada tabel 2 yang menunjukkan bahwa hubungan variabel Sistem Pengendalian Internal (SPI) dengan Kualitas Laporan Keuangan (KLK) menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,677 dengan nilai t statistik sebesar 3,782. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel sebesar 1,96. Hasil ini berarti menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti **Hipotesis 4 diterima**.

Sistem pengendalian internal meliputi berbagai alat manajemen untuk menjamin kepatuhan terhadap

hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi-operasi pemerintah. Dengan demikian, pengendalian intern merupakan fondasi *good governance* dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi dalam penyusunan LKPD

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
- 2) Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin baik standar akuntansi yang diterapkan maka akan semakin baik juga kualitas laporan keuangan.
- 3) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
- 4) Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Saran

Saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi kesempurnaan penelitian selanjutnya yaitu :

- 1) Sebaiknya peneliti memastikan bahwa responden mengerti maksud dari kuesioner yang akan diisi agar data yang diperoleh nantinya tidak bias dan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam penelitian.
- 2) Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metode lain seperti metode

interview untuk mendapatkan kejujuran jawaban responden.

- 3) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas area penelitian, tidak hanya pada dinas dan badan di satu kota, sehingga lebih dapat digeneralisasikan.

Pada penelitian selanjutnya diharapkan peneliti dapat menambah beberapa variabel independen lain yang diduga juga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Reza Ali. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi. Universitas Pendidikan Indonesia. Respository.upi.edu.Perpustakaan.upi.edu.
- Bastian, Indra., 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Desianawati, Kadek. 2014. *Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, peneraan standar akuntansi pemerintah dan system keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerinta daerah*.
- Gozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program PLS* . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hariandja, M.T.E. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo.

- Munteh, Ridha Rizaldy, 2013. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten labuhan batu*. Universitas Negeri Medan
- Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra, Maulidah Rahmawati, 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta; Salemba Empat
- Nurillah, AsSyifa dan Dul Muid (2014) *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok)* Universitas Diponegoro
- Puri surastiani, dyah. 2015. *Analisis factor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah*.
- Roviyanti, Devi. 2011. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tasikmalaya)*. Program Sarjana Universitas Siliwangi
- Sukmaningrum, Tantriani. 2012. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang)*. Universitas Diponegoro. Semarang
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah
- , Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- , Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- www.bpk.go.id
www.informatika.lipi.go.id